

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Rujukan penelitian bertujuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dan menjadi perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah ada. Berikut beberapa penelitian terdahulu.

2.1.1 Murba, Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan judul “Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”. Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Flsafat Dan Politik Uin Alauddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong.¹

Penelitian ini menjadi patokan dari penelitian yang akan diteliti penulis karena memiliki kesamaan dari segi fokus penelitiannya dimana penelitian ini sama-sama meneliti terkait infrastruktur akan tetapi penelitian ini meneliti terkait implementasi program pembangunan infrastruktur Di Desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu berfokus pada analisis pembangunan infrastruktur program Kotaku di kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare.

2.1.2 Almas Zuhrya, “Peranan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Sebagai Media Pendidikan Sosial Untuk Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi”. Tujuan

¹ Murba, “*Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.*” (Skripsi sarjana: Fakultas Ushuluddin Flsafat Dan Politik Uin Alauddin Makassar,2017), h. 7

penelitian ini membahas persoalan (1) Mendeskripsikan proses pengembangan program kerja KOTAKU sebagai media pendidikan sosial di Desa Putih Kecamatan Gampangrejo Kabupaten Kediri, (2) Mendeskripsikan implementasi program KOTAKU dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Putih Kecamatan Gampangrejo Kabupaten Kediri, (3) Mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan program KOTAKU di Desa Putih Kecamatan Gampangrejo Kabupaten Kediri.²

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis jelas pada fokus penelitian dimana, penulis disini bertujuan melihat bagaimana analisis dampak pembangunan infrastruktur program Kotaku di Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare yang telah berjalan sedangkan penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pengembangan program KOTAKU sebagai media pendidikan sosial, implementasi program KOTAKU, dan kendala dalam pelaksanaan program KOTAKU.

2.1.3 Indah Nur Fitrianiingsih, “Model Pengembangan Masyarakat Melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)” metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Skripsi ini berkesimpulan bahwa program KOTAKU mempunyai konsep botton up melalui target program KOTAKU base line 100-0-100. Yang artinya 100% masyarakat mendapatkan sarana air bersih. 0% pengurangan luasan Kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak.³

² Almas Zuhrya, “Peranan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Sebagai Media Pendidikan Sosial Untuk Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Masyarakat Marginal di Desa Putih Kecamatan Gampangrejo Kabupaten Kediri).” (Skripsi Sarjana: Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017),h.19

³ Indah Nur Fitrianiingsih, “Model Pengembangan Masyarakat Melalui Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) (Studi Analisis di Desa Krajankulon, Kecataman Kaliwungu, Kabupaten. Kendal.” (Skripsi Sarjana: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), h.10

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis jelas terletak pada fokus penelitian dimana, penulis disini bertujuan melihat bagaimana dampak program pembangunan berbasis Infrastruktur KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Ujung Sabbang kota Parepare sedangkan penelitian ini bertujuan mendeskripsikan model pembangunan masyarakat melalui program KOTAKU di Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Pembangunan

Weber mendefinisikan semangat kapitalisme ini sebagai sebuah kebiasaan yang menunjang pengejaran keuntungan ekonomi secara rasional. Dia juga menunjukkan bahwa semangat seperti itu adalah hal biasa dalam kebudayaan barat bila dipandang sebagai sifat individual.⁴ Teori Weber tentang peran agama khususnya Protestan dalam pembentukan kapitalisme merupakan sumber aliran. Apabila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau agama dapat diarahkan kepada sikap yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi maka proses pembangunan dalam masyarakat tersebut dapat terlaksana.

Era modernisasi saat ini pembangunan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara. Oleh sebab itu konsep-konsep serta definisi-definisi pembangunan dapat memunculkan teori seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Todaro pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan

⁴ Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, (terj. TW. Uotomo Yogyakarta: pustaka pelajar, 2006), 65-66

ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.⁵ Menurut Siagian pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Dari defenisi diatas akan muncul tujuh ide pokok pembangunan antara lain:

1. Pembangunan merupakan suatu proses, pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang bersifat tanpa akhir.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik jangka waktu pendek, jangka sedang, dan jangka panjang, yang dimana dilakukan untuk jangka waktu tertentu.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan pembangunan
5. Pembangunan mengarah modernitas yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya.
6. Modernitas yang ingin dicapai bersifat multidimensional.
7. Pembangunan ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga semakin kukuh fondasinya dan menjadi negara yang sejajar dengan bangsa lain.⁶

Dari berbagai macam pengertian dari pembangunan maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang melibatkan masyarakat untuk melakukan proses perubahan dan sebuah transformasi yang dilakukan dalam rangka

⁵ Todaro, Michael P. 2006. Hal 18. Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan Jilid I) Erlangga: Jakarta

⁶ Siagian, Sondang P. 2004. Hal 90. Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management) Jilid 2. Toko Gunung Agung: Jakarta

menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial dan memiliki kehidupan yang layak.

2.2.1.1 Indikator Pembangunan

Indikator Pembangunan merupakan tolak ukur yang digunakan dalam mengukur performa suatu negara dalam pencapaian pembangunannya, serta perbandingan terhadap negara-negara lain.⁷

Adapun indikator keberhasilan sebagai berikut:

- Kebijakan ekonomi yang dirumuskan secara konseptual dengan pertumbuhan dari aspek sosial lingkungan yang berbasis politik yang bertanggung jawab.
- Transparansi sosial (pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial) seperti permudahan kesehatan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁸

Pada setiap pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah baik negara, provinsi, kota atau desa/kelurahan tentu mempunyai indikator dalam pencapaian keberhasilan. Dimana indikator pembangunan yang dimaksud dalam hal kebijakan ekonomi, transparansi sosial, dan peningkatan kualitas sdm (sumber daya manusia).

2.2.1.2 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pertama sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi sosial dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir

⁷ Uny, “EKONOMIKA PEMBANGUNAN: INDIKATOR PEMBANGUNAN” (<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405899/pendidikan/EKO.+PEMB+Indikator+Pembangunan.pdf>, diakses pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 10.47).

⁸ Website Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng, “Teori dan Indikator Pembangunan” (<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/teori-dan-indikator-pembangunan-12>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 14.20).

kepada manusia, kedua memenuhi dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang, ketiga kegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (sosio-politik atau alam) dalam waktu tak terbatas, keempat integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan lingkungan secara koheren sehingga generasi manusia dan makhluk hidup lain dapat hidup pada saat ini maupun pada masa mendatang tanpa batas, kelima memenuhi kebutuhan dan aspirasi dibawah faktor pembatas lingkungan, sosial dan teknologi, keenam hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan ketujuh menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam.⁹

2.2.1.3 Infrastruktur

Infrastruktur (*infrastructure*), menurut definisi adalah struktur fisik dan organisasi dasar (seperti bangunan, jalan, pasokan energi) yang diperlukan untuk beroperasinya masyarakat dan institusi.¹⁰ Definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum.¹¹ Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya.

Definisi lain infrastruktur menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.¹²

⁹ C Ordonez, PN Duinker. 2010, *Interpreting Sustainability for Urban Forests*, Jurnal Canada. Vol 2, (2018) h.124-127

¹⁰ Sulistijo Sidarto dan Budi Santoso, *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi*, (Depok: Prenadamedia Group,2018), h.1

¹¹ "Infrastruktur" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/infrastruktur> diakses 18 juni 2020

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015. "Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur". Pasal 1 ayat (4)

Infrastruktur berkaitan pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.¹³

Infrastruktur dalam ilmu ekonomi merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang meliputi: jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan.¹⁴ Sedikitnya ada sejumlah manfaat infrastruktur diantaranya:

- a. Meningkatkan konektivitas antar wilayah atau antar negara;

¹³ World Bank. 1994. "World Development Report: Infrastructure for Development". New York. Oxford University Press. h.15.

¹⁴ Warsilah dan Akhmad Noor, "Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda", Mimbar, Vol 31, No. 2 (Desember, 2015):359-366, h. 361

- b. Meningkatkan produktivitas suatu wilayah atau negara;
- c. Meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya;
- d. Mempercepat pemerataan pembangunan suatu wilayah atau negara;
- e. Mendorong investasi baru yang masuk ke wilayah atau negara tersebut.¹⁵

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015, jenis Infrastruktur ekonomi dan sosial mencakup:

- a. Infrastruktur transportasi;
- b. Infrastruktur jalan;
- c. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- d. Infrastruktur air minum;
- e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. Infrastruktur sistem pengelolaan limbah setempat;
- g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. Infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- k. Infrastruktur konservasi energi;
- l. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- o. Infrastruktur kawasan;
- p. Infrastruktur pariwisata;
- q. Infrastruktur kesehatan;

¹⁵ Sulistijo Sidarto dan Budi Santoso, "Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi".h.1

- r. Infrastruktur lembaga permasyarakatan; dan
- s. Infrastruktur perumahan rakyat.¹⁶

Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga menjadi sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi.

Analisis tentang pengaruh pembangunan infrastruktur publik terhadap pertumbuhan ekonomi makro nasional dan regional ataupun indikator ekonomi makro lainnya mempunyai kaitan erat dengan kebijakan pembangunan infrastruktur publik. Dengan demikian analisis tentang dampak pembangunan infrastruktur publik di Indonesia mempunyai kaitan yang erat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur publik. Dalam kaitannya dengan jenis-jenis infrastruktur, diatur dengan Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2005, Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur yaitu: infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum dan sanitasi, telematika, ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi.¹⁷

Sementara di tahun 2019 Kegiatan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Ujung Sabbang kota Parepare sejauh ini telah menghasilkan beberapa pengerjaan, seperti pembangunan jalan lingkungan, pembangunan lampu lorong, selanjutnya

¹⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015. “Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur”. Pasal 5 ayat (2)

¹⁷ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pasal 5 huruf a-g

dibidang perairan seperti drainase atau gorong-gorong, sebagaimana menjadi hal yang prioritas bagi pemerintah kota.

Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan yang dirasakan masyarakat diberbagai hal karena cukup beralasan jika pembangunan infrastruktur mendapat perhatian pemerintah. Pembangunan infrastruktur ditinjau dari aspek kepentingan masyarakat dapat meningkatkan kemudahan akses bagi sosial lingkungan¹⁸.

2.2.2 Teori Partisipasi

Partisipasi berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalah.¹⁹

Pemberdayaan merupakan jalan atau sarana menuju partisipasi. Sebelum mencapai tahap tersebut, tentu saja dibutuhkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan memiliki dua elemen pokok yakni kemandirian dan partisipasi. Partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan

¹⁸ Yonatan, dkk, "Implementasi pembangunan infrastruktur dalam menunjang kelancaran pelayanan pada masyarakat di kecamatan mentarang kabupaten malinau". (Jurnal *administrative reform*. 2014), h. 541

¹⁹ Fasli Djalal dan Dedi Supriadi. "*Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*", (Yogyakarta: Adicita.2001),h.12

proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Titik tolak dari partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar. Partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan peranserta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat.²⁰ beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program.
2. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.
3. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.
4. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

²⁰ Fredian Tonny Nasdian. *Pengembangan Masyarakat (Community Development)*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor. 2006), h. 43

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang maksudnya adalah keikutsertaan masyarakat untuk menghadiri musyawarah atau rapat-rapat yang diadakan oleh Pemerintah Kelurahan beserta pemangku program lainnya dalam rangka melakukan suatu pembangunan infrastruktur.²¹

Istilah partisipasi merupakan terjemahan dari istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris “*participation*”. Menurut Kamus Bahasa Indonesia partisipasi diartikan sebagai “pengambilan bagian” atau “pengikutsertaan”.²² Sehingga itu partisipasi mengandung makna semua pihak yang terkait mengambil bagian atau ikut serta secara aktif berdasarkan potensi yang dimilikinya secara bersama-sama.²³ Partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.²⁴

2.2.3 Teori Dampak

Dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.²⁵ Dampak merupakan akibat atas adanya pengaruh yang datang dari dalam maupun luar.

2.2.3.1 Definisi Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh, atau akibat. Dalam setiap keputusan yang

²¹ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 230

²² Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2000) h.33

²³ Marzuki M, *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif*, Modul PKM (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2004), h. 24

²⁴ Taliziduhu, *Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), h. 45

²⁵ Waralah Cristo, *Pengertian Tentang Dampak*, (Jakarta: Bandung Alfabeta, 2008), h.12.

diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.²⁶

2.2.3.2 Dampak Positif dan Negatif

1. Dampak Positif

Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimism dari pada peminisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan focus mental seseorang pada yang negative. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung kegiatan yang baik.

2. Dampak Negatif

²⁶ Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya,), h.243

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberi kesa kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa dampak negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

2.2.3.3 Dampak Perubahan Sosial

Wilbert Moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial dan yang dimaksudkan dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial yang di dalamnya berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomenal kultural. Jadi perubahan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial serta setiap modifikasi pola antarmubungan yang mapan dan standart perilaku.²⁷ Perubahan yang terjadi terhadap bentuk dari trap-trap merupakan suatu perubahan sosial karena adanya fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia.

2.2.4 Konsep Islam Dalam Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur ekonomi merupakan jenis pembangunan infrastruktur yang secara langsung mendorong

²⁷ Moore E. Wilbert, Order dan Change: Essays in comparative sociology (New York: 1967) h.3

kegiatan ekonomi masyarakat berupa pembangunan infrastruktur fisik, yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi serta yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Pembangunan infrastruktur ekonomi meliputi semua prasarana umum, berupa tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih, dan sanitasi, serta pembuangan limbah. Adapun pembangunan infrastruktur sosial adalah jenis pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan sosial, meliputi prasarana kesehatan dan pendidikan dan lain-lain. Baik infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial merupakan bagian yang penting untuk diwujudkan dalam satu daerah atau wilayah.

Tujuan kebijakan pembangunan dalam kerangka Konsep Pembangunan Dalam Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sumber daya insani, yaitu menjadikan manusia sebagai objek utama dari kebijakan pembangunan Islam. Fokus utama dilakukan pada pengembangan pendidikan, orientasi spiritual dan pengembangan struktur hubungan yang berbasiskan kepada kerjasama, perkongsian dan penyertaan.
- 2) Pertambahan pengeluaran yang bermanfaat, dalam hal ini diutamakan pada pengeluaran yang mengutamakan keperluan dasar (dharuriyat).
- 3) Peningkatan kualitas kehidupan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja, pengadaan sistem jaminan sosial, dan pemerataan pendapatan.
- 4) Pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang harmoni, tidak

terjadi kepincangan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah.

5) Pembangunan teknologi baru.²⁸

Tujuan pembangunan ekonomi Islam seirama dengan tujuan pokok Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia (*falah*). Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik dan kedamaian mental yaitu kebahagiaan, yang hal ini dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas individu²⁹.

Maka pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian penting juga tidak luput dari perhatian. Jika suatu negara memiliki infrastruktur yang memadai dan tepat sasaran maka tujuan ekonomi akan mudah tercapai. Selain itu, aspek sosial juga terkena dampak sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan sisi sosial masyarakat suatu negara tersebut. Tentu tidak kalah pentingnya adalah bahwa pembangunan infrastruktur tersebut hendaknya untuk kepentingan seluruh elemen masyarakat, bukan atas dasar kepentingan-kepentingan individu tertentu.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Analisis

Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.³⁰

2.3.2 Pembangunan

²⁸ Joni Tamkin Borhan, "Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam". Jurnal Ushuluddin. Vol. 27 2008 hal. 93.

²⁹ Rifyal Zuhdi, Annisa Qadarusman, "Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 6 2020 hal. 211

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta. 2015), h. 28

Pembangunan (development) menurut Alexander adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Karena pembangunan yang bersifat dinamis, tentunya perlu diatur secara terencana, efisien dan efektif disesuaikan dengan kapasitas manusia di suatu wilayah.

2.3.3 Infrastruktur

Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.³¹

2.3.4 Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh atau satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.³²

2.3.5 KOTAKU

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem

³¹ Kodoatie, R.J, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar (2003), h,23

³² Raharjo adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.10

yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “*platform* kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.³³

Program KOTAKU ini merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya yaitu PNPM Mandiri. PNPM Mandiri Perkotaan hampir sama dengan program Kotaku karena berasal dari program yang sama, yaitu Kementerian (PUPR) Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, hanya saja PNPM Mandiri bertujuan untuk meningkatkan akses sosial untuk masyarakat miskin serta memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Sedangkan program Kotaku bertujuan untuk mencegah dan menangani pemukiman. Namun Kotaku tetap berfokus juga pada masyarakat miskin, yaitu untuk meningkatkan kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat.

2.3.6. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan

³³Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya. “PEDOMAN UMUM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)”. Nomor: 40 /SE/DC/2016.ha1.2-3

dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.³⁴

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan dari hasil program kotaku bisa saja berdampak baik atau buruk, keikutsertaan masyarakat dari awal pengerjaan sampai tahap pemeliharaan juga sangat mempengaruhi, dampak yang ditimbulkan dari keikutsertaan masyarakat mempengaruhi bertahan tidaknya program yang telah dibangun, tentu ada alasan mengapa program yang telah dibangun tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, hal tersebut tentu membawa dampak bagi masyarakat sekitar.

2.3.7 Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.³⁵

³⁴ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, h.234.

³⁵ Undang-undang No.1 tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Perkumuhan* Pasal 1 ayat (13), (14).

2.4 Kerangka Pikir

